PROFIL PNS
KABUPATEN BATANG

PERIODE DESEMBER 2023

REGISTER BPS : K-22.3325.001

Jumlah PNS Kabupaten Batang Berdasarkan

1. PANGKAT DAN GOLONGAN
2. ESELON JABATAN
3. TINGKAT PENDIDIKAN
4. JENIS KELAMIN
5. AGAMA
6. USIA

SIMPEG BKD KAB.BATANG
BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE DESEMBER 2023 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran "Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah" dan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)"**.

PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE DESEMBER 2023 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE DESEMBER 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 31 Desember 2023
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG **1**

1.2. LANDASAN HUKUM **2**

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN **3**

1.4 METODE PENYUSUNAN DATA **4**

1. PENGUMPULAN DATA 4
2. PENYAJIAN DATA 4

BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI **5**

TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN 6
TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN 6
TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN 7
TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN 7
TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA 10
TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI 12
TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN 12
TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN 13
TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA 16
TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 23
TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD 27
TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD 29
TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD 31
GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk

aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil PNS Kabupaten Batang Bulan Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil PNS Pemerintah Kabupaten Batang Bulan Desember 2023 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka

perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.

4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang

1.4 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE DESEMBER 2023 disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB II
HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2023 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon Jabatan
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah PNS berdasarkan Agama
6. Jumlah Jabatan Yang Tersedia dan Terisi
7. Jumlah PNS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
8. Jumlah PNS berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan ***Desember 2023 adalah*** **5.296** PNS terinci sebagai berikut :

TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	56	5	61
II/a	Pengatur Muda	32	2	34
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	76	5	81
II/c	Pengatur	204	117	321
II/d	Pengatur Tingkat I	196	55	251
III/a	Penata Muda	334	568	902
III/b	Penata Muda Tingkat I	338	474	812
III/c	Penata	239	477	716
III/d	Penata Tingkat I	337	613	950
IV/a	Pembina	343	408	751
IV/b	Pembina Tingkat I	158	190	348
IV/c	Pembina Utama Muda	48	15	63
	Jumlah	2366	2930	5296

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS terbanyak adalah PNS Golongan III (3380 PNS) , diikuti PNS Golongan IV (1162 PNS), PNS Golongan II (687 PNS) dan jumlah PNS terendah adalah PNS Golongan I (67 PNS).

TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Total
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1285	2392	3677
Jabatan Fungsional Umum	NON	824	396	1220
Jabatan Struktural	II.b	24	1	25
Jabatan Struktural	III.a	42	6	48
Jabatan Struktural	III.b	60	35	95
Jabatan Struktural	IV.a	98	71	169
Jabatan Struktural	IV.b	33	29	62
		2366	2930	5296

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa jumlah Eselon PNS terbanyak adalah Eselon IV (231 PNS), diikuti PNS Eselon III (143 PNS), PNS Eselon II (25 PNS).

TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S-3/Doktor	3	1	4
S-2	194	161	355
S-1/Sarjana	1303	1820	3123
Diploma IV	24	76	100
Diploma III/Sarjana Muda	174	692	866
Diploma II	44	23	67
Diploma I	1	4	5
SLTA Kejuruan	43	10	53
SLTA	434	126	560
SLTP Kejuruan	1	0	1
SLTP	100	9	109
Sekolah Dasar	45	8	53
Jumlah	2366	2930	5296

Dari Tabel 2.3 jumlah PNS didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 (3.123 PNS), diikuti oleh tingkat pendidikan D.III (866 PNS) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan S-3 (4 PNS) .

TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	UNOR	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	13	14	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	10	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	31	37	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10	14	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	15	39	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	24	38
7	DINAS KESEHATAN	630	155	785
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	11	7	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	16	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	40	51

11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	34	37	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13	19	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	108	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	11	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13	13	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1600	1181	2781
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	41	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	60	72
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18	15	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	23	36
22	DINAS SOSIAL	7	13	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	24	18	42
24	KECAMATAN BANDAR	5	14	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	3	9	12
26	KECAMATAN BATANG	25	46	71
27	KECAMATAN BAWANG	4	9	13
28	KECAMATAN BLADO	5	6	11
29	KECAMATAN GRINGSING	4	8	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	10	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	6	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	16	17
34	KECAMATAN SUBAH	2	10	12
35	KECAMATAN TERSONO	3	9	12
36	KECAMATAN TULIS	2	10	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	8	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	15	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	217	110	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	67	29	96

42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	38	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	34	66	100
44	SEKRETARIAT DPRD	5	24	29
	Jumlah	2.930	2.366	5.296

Dari Tabel 2.4 jumlah PNS dengan jenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak (2.930 PNS) sedangkan PNS dengan jenis kelamin laki-laki 2.366 PNS, selisih 564 PNS.

TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA

No	UNOR	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	0	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	66	1	1	0	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24	0	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	54	0	0	0	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	0	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	775	2	7	0	1	0	785
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	18	0	0	0	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	0	0	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	0	1	0	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	71	0	0	0	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32	0	0	0	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	123	0	0	0	0	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	0	0	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26	0	0	0	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2746	13	22	0	0	0	2781
18	DINAS PERHUBUNGAN	43	1	1	0	0	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	72	0	0	0	0	0	72
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	0	0	0	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35	0	1	0	0	0	36
22	DINAS SOSIAL	20	0	0	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	42	0	0	0	0	0	42

24	KECAMATAN BANDAR	19	0	0	0	0	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	0	0	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	71	0	0	0	0	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	13	0	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	11	0	0	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	12	0	0	0	0	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	11	0	0	0	0	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	10	0	0	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	12	0	0	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	12	0	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	12	0	0	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	12	0	0	0	0	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23	0	1	0	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	322	2	2	0	1	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	0	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	43	1	0	0	0	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	100	0	0	0	0	0	100
44	SEKRETARIAT DPRD	29	0	0	0	0	0	29
	JUMLAH	5232	22	40	0	2	0	5296

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah PNS dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 98% (5232 PNS) dari seluruh PNS sisanya dibagi oleh Protestan (40 PNS), Katholik (22 PNS), Budha (2 PNS) dan Hindu (0 PNS).

TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia	Terisi	Kosong
2.a	1	0	1
2.b	32	25	7
3.a	56	48	8
3.b	105	95	10
4.a	190	169	21
4.b	76	62	14
TOTAL	460	399	61

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (21 jabatan), hanya terisi 169 dari 190 jabatan yang tersedia.

TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru	4	3	7
2	Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	0	1	1
3	Guru Kelas Ahli Pertama	15	27	42
4	Guru Madya	328	452	780
5	Guru Muda	284	564	848
6	Guru Pendidikan Agama Islam Ahli Pertama	10	15	25
7	Guru Penjasorkes Ahli Pertama	3	0	3
8	Guru Pertama	196	302	498
9	Pamong Belajar Ahli Pertama	0	1	1
10	Pamong Belajar Madya	2	0	2
11	Pamong Belajar Pertama	0	1	1
12	Pamong Budaya Ahli Muda - Subkoordinator Sejarah, Tradisi Dan Tenaga Kebudayaan	0	1	1
13	Pamong Budaya Ahli Pertama	1	0	1
14	Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pai) Smp Madya	0	1	1
15	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum Dan Penilaian Smp	1	0	1
16	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum, Penilaian,	1	0	1

	Pengembangan Peserta Didik Dan Pem			
17	Pengawas Sekolah Madya	32	12	44
18	Pengawas Sekolah Madya - Tk/Sd	1	1	2
19	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
20	Penilik Madya	6	0	6
21	Penilik Muda	2	1	3
	Jumlah	887	1387	2274

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak disi oleh jabatan Guru (2204 PNS) dari 2274 PNS fungsional pendidikan, sisanya disi Pengawas (55 PNS), Penilik (9 PNS) dan Pamong belajar (6 PNS).

TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
2	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	3	4
3	Apoteker Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	4	4
4	Apoteker Penyelia	0	1	1
5	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	6	6
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non BLUD	1	2	3
7	Asisten Apoteker Penyelia	1	13	14
8	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	0	4	4
9	Bidan Ahli Madya / Madya	0	17	17
10	Bidan Ahli Muda / Muda	0	40	40
11	Bidan Ahli Pertama / Pertama	0	21	21
12	Bidan Mahir / Lanjutan	0	96	96
13	Bidan Pelaksana Lanjutan	0	114	114
14	Bidan Penyelia	0	90	90
15	Bidan Terampil / Pelaksana	0	36	36
16	Dokter Ahli Madya / Madya	22	27	49
17	Dokter Ahli Muda / Muda	0	3	3
18	DOKTER AHLI PERTAMA	1	1	2
19	Dokter Ahli Pertama / Pertama	7	7	14
20	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	1	4	5
21	Dokter Gigi Ahli Pertama / Pertama	0	7	7

22	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	1	0	1
23	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	0	1	1
24	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	2	2
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	2	0	2
26	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
27	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
28	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	1	0	1
29	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
30	Nutrisionis Ahli Madya / Madya NON BLUD	0	1	1
31	Nutrisionis Ahli Muda / Muda	0	6	6
32	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama	1	0	1
33	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	1	1
34	Nutrisionis Mahir / Lanjutan	0	1	1
35	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
36	Nutrisionis Penyelia	0	11	11
37	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	0	1	1
38	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	0	1	1
39	Penata Anestesi Ahli Madya	1	1	2
40	Penata Anestesi Ahli Muda	2	0	2
41	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	3	4
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	0	1
43	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA NON BLUD	1	0	1
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2	0	2
45	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA - NON BLUD	0	1	1
46	Perawat Ahli Madya	8	21	29
47	Perawat Ahli Muda	13	18	31
48	Perawat Ahli Pertama	15	6	21
49	Perawat Gigi Ahli Muda	0	1	1
50	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	2	3
51	Perawat Gigi Penyelia	1	16	17
52	Perawat Gigi Terampil	1	5	6
53	Perawat Madya	4	9	13
54	Perawat Mahir	1	5	6
55	Perawat Muda	4	10	14

56	Perawat Pelaksana	2	0	2
57	Perawat Pelaksana Lanjutan	4	15	19
58	Perawat Penyelia	63	144	207
59	Perawat Pertama	1	1	2
60	Perekam Medis Pelaksana	5	6	11
61	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
62	Perekam Medis Penyelia	1	5	6
63	Perekam Medis Penyelia NON BLUD	1	0	1
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	0	1
65	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	0	2	2
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1	2	3
67	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	6	7
68	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia NON BLUD	0	1	1
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	5	8	13
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non BLUD	3	1	4
71	Radiografer Pelaksana	0	2	2
72	Radiografer Penyelia	3	3	6
73	Refraksionis Optisien Penyelia	0	1	1
74	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	0	2	2
75	Sanitarian Ahli Madya / Madya	0	2	2
76	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
77	Sanitarian Penyelia	2	4	6
78	TEKNIK ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	0	1
79	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	0	1	1
80	Teknisi Elektromedis Pelaksana	3	0	3
81	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
82	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	2	0	2
83	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	1	1	2
84	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	0	1
	Jumlah	200	834	1034

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak disi oleh jabatan Bidan (414 PNS) dari 1034 PNS fungsional Kesehatan dan jabatan Perawat (371 PNS), sedangkan Dokter (70 PNS) dan Doker Gigi (12 PNS).

TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN	1	0	1
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DATA, INFORMASI DAN KERJASAM	0	1	1
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	1	0	1
5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA (PB)	0	1	1
6	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	0	1	1
7	ANALIS HUKUM AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	0	1	1
8	ANALIS HUKUM MUDA (PB)	0	1	1
9	ANALIS KEBENCANAAN MUDA (PB)	2	0	2
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	2	4	6
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	0	1
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR ASPIRASI DAN DOKUMENTASI	1	0	1
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	1	0	1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGANGGARAN	1	0	1
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGAWASAN	1	0	1
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	0	1	1
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1	0	1
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	1
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	1	1
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1	0	1
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYUSUN PROGRAM	1	0	1
22	ANALIS KEBIJAKAN MUDA (PB)	5	3	8
23	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	0	1	1

24	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	1
25	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	1	0	1
26	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	0	3	3
27	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2	2	4
28	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA (PB)	2	4	6
29	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
30	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS HOLTIKULTURA	0	1	1
31	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	1	0	1
32	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	0	1	1
33	Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	0	1	1
34	Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
35	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENELITIAN	0	1	1
36	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN PASAR	1	0	1
37	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	0	1	1
38	ANALIS PERDAGANGAN MUDA (PB)	2	0	2
39	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	2	0	2
40	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	0	1	1
41	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA (PB)	1	6	7
42	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	1	2
43	ARSIPARIS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1	0	1
44	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	2	2
45	Arsiparis Mahir	0	1	1

46	ARSIPARIS MUDA (PB)	0	1	1
47	Arsiparis Pelaksana	0	2	2
48	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
49	Arsiparis Penyelia	2	0	2
50	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	0	5
51	ASSESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	1
52	AUDITOR AHLI PERTAMA	0	3	3
53	Auditor Madya	2	1	3
54	Auditor Muda	3	7	10
55	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	2	0	2
56	Instruktur Muda	0	1	1
57	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	0	1	1
58	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	0	1
59	Medik Veteriner Muda (PB)	0	1	1
60	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
61	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	1	0	1
62	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	0	1	1
63	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
64	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
65	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN OLAHRAGA	0	1	1
66	Pemadam Kebakaran Terampil	3	0	3
67	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	1	1	2
68	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI, PENGENDA	0	1	1
69	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUAR	1	0	1
70	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGGERAKAN INSTITUSI DAN PERA	1	0	1
71	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYULUH DAN PENGGERAKAN	0	1	1
72	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA (PB)	0	1	1
73	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA -	0	1	1

	SUBKOORDINATOR KEDARURATAN DAN LOGISTIK			
74	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA (PB)	1	1	2
75	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	1	2	3
76	PENATA RUANG AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG	1	0	1
77	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	1	2
78	PENATA RUANG MUDA (PB)	0	1	1
79	Penera Ahli Pertama	0	2	2
80	Penera Pelaksana	1	1	2
81	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	0	1	1
82	Pengantar Kerja Pertama	0	2	2
83	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	1	0	1
84	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
85	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
86	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	0	1
87	Pengawas Bibit Ternak Pertama	0	1	1
88	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA (PB)	1	0	1
89	Pengawas Kemetrologian Pertama	1	0	1
90	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, PERIJINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERAT	1	0	1
91	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
92	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	1	0	1
93	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN	1	0	1
94	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA (PB)	0	1	1
95	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
96	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
97	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	4	0	4

98	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	1	6	7
99	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	0	1	1
100	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	0	1
101	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	0	1	1
102	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
103	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLIPERTAMA	1	0	1
104	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	0	3
105	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	6	0	6
106	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1	0	1
107	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA (PB)	0	1	1
108	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0	1	1
109	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH	1	0	1
110	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA (PB)	0	1	1
111	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana	0	1	1
112	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	0	1	1
113	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	0	1	1
114	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI	1	0	1
115	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	1	0	1
116	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	0	1
117	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA (PB)	2	2	4
118	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	0	2
119	PENYULUH PERINDUSTRIAN MUDA (PB)	2	0	2
120	Penyuluh Pertanian Madya	9	1	10
121	Penyuluh Pertanian Muda	7	4	11
122	PENYULUH PERTANIAN MUDA (PB)	0	2	2

123	Penyuluh Pertanian Pelaksana	0	2	2
124	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12
125	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	1	1
126	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
127	PENYULUH SOSIAL MUDA (PB)	1	0	1
128	Penyuluh Sosial Pertama	1	0	1
129	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1	1
130	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1	0	1
131	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMERINTAHAN	0	1	1
132	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	1
133	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	0	1
134	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM	3	0	3
135	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	2	1	3
136	Perencana Muda	0	1	1
137	PERENCANA MUDA (PB)	8	5	13
138	Perencana Pertama	2	2	4
139	PERISALAH LEGISLATIF MUDA (PB)	1	0	1
140	Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana	3	0	3
141	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	1
141	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA (PB)	1	1	2
142	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	1	1
143	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	0	2	2
144	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	1	0	1
145	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	0	1
146	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	0	1	1
147	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0	1
148	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1	0	1
149	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
150	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9

151	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BLUD	0	1	1
152	Pranata Komputer Pertama	4	3	7
153	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	1	3	4
154	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL BLUD	1	0	1
155	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR LAYANAN, INFORMASI, OTOMASI DAN KERJASAMA	0	1	1
156	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	0	1	1
157	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
158	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
159	SANDIMAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	1	0	1
160	STATISTISI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR STATISTIK SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN BUDAYA	1	0	1
161	STATISTISI MUDA (PB)	0	1	1
162	Statistisi Pelaksana	0	1	1
163	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
164	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	3	0	3
165	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA (PB)	1	0	1
166	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
167	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	1	0	1
168	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	1	0	1
169	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1
170	Teknik Pengairan Pelaksana	2	0	2
171	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAWAS	1	0	1
172	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
173	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS P	0	1	1
174	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	0	1	1
175	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRAS	1	0	1
176	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	1	0	1
177	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
178	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
179	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
180	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
181		198	171	369

182	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
183	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
184	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
185	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
	Jumlah	**198**	**172**	**370**

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (37 PNS) dari 370 PNS fungsional Lainnya.

TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
2	AJUDAN	0	1	1
3	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
4	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	0	1	1
5	ANALIS BENCANA	1	1	2
6	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
7	ANALIS HUMAS	1	2	3
8	ANALIS IDEOLOGI	1	0	1
9	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	0	1
10	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	0	1
11	ANALIS JABATAN	0	1	1
12	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	0	1	1
13	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	0	1
14	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	0	1	1
15	ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	0	1
16	ANALIS KEMASYARAKATAN	0	1	1
17	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	0	5
18	ANALIS KESEHATAN	2	1	3
19	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	0	1
20	ANALIS KEUANGAN	0	2	2
21	ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	0	1
22	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	0	1
23	ANALIS LAYANAN UMUM	4	8	12
24	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1
25	ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
26	ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
27	ANALIS PARIWISATA	0	1	1
28	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
29	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	0	1	1
30	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
31	ANALIS PENDIDIKAN	2	0	2
32	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	0	2
33	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	0	1	1

34	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1
35	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	0	2
36	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	0	1
37	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
38	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	0	1
39	ANALIS PERBENDAHARAAN	1	0	1
40	ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
41	ANALIS PERPUSTAKAAN	1	0	1
42	ANALIS PERTANAHAN	0	1	1
43	ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
44	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	0	1	1
45	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	0	2
46	ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
47	ANALIS PROTOKOL	0	2	2
48	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	0	1	1
49	ANALIS TAMAN	1	0	1
50	Analis Toponimi dan Data Wilayah	0	1	1
51	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	1	3
52	BENDAHARA	6	5	11
53	BIDAN TERAMPIL	0	6	6
54	BINATU RUMAH SAKIT	2	0	2
55	DOKTER GIGI - AHLI PERTAMA	0	1	1
56	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	0	1
57	GURU	8	4	12
58	GURU KELAS AHLI PERTAMA	16	49	65
59	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	0	1	1
60	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	44	55	99
61	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	1	1	2
62	JURU PUNGUT RETRIBUSI	44	2	46
63	OPERATOR ALAT BERAT	1	0	1
64	OPERATOR MESIN	1	0	1
65	OPERATOR RADIO	1	1	2
66	OPERATOR TERMINAL	15	0	15
67	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	1	0	1
68	PEMELIHARA JALAN	12	0	12
69	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	0	1
70	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	0	1
71	PENELAAH PERKEMBANGAN BUMD	1	0	1
72	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0	1
73	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	1
74	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
75	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	1	3
76	PENGADMINISTRASI PERIJINAN	1	0	1
77	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	2	3
78	PENGADMINISTRASI UMUM	285	90	375
79	PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	7	15
80	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	0	1
81	PENGAWAS KOPERASI	1	0	1
82	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	0	1
83	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	0	1

84	PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	2	0	2
85	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	1	3
86	PENGELOLA BARANG	1	0	1
87	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4	4	8
88	PENGELOLA BENGKEL	2	0	2
89	PENGELOLA DATA	9	7	16
90	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	0	2
91	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	0	3
92	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
93	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	0	1
94	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	3	4	7
95	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	0	1	1
96	PENGELOLA GAJI	0	1	1
97	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
98	PENGELOLA KEPERAWATAN	1	0	1
99	PENGELOLA KEUANGAN	51	48	99
100	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	0	1	1
101	PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
102	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	0	3	3
103	PENGELOLA PASAR	1	0	1
104	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	0	1
105	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
106	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
107	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	0	2
108	PENGELOLA PENDAPATAN	2	0	2
109	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	0	1
110	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI PERTAMA	0	2	2
111	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
112	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	1	1
113	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
114	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	2	3
115	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	0	1	1
116	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	0	1
117	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1
118	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
119	PENGEMUDI	11	0	11
120	PENGEMUDI AMBULANCE	4	0	4
121	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	0	1
122	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	0	1
123	PENJAGA PINTU AIR	6	0	6
124	PENYULUH KEPEMUDAAN	1	0	1
125	PENYULUH KOPERASI	0	1	1
126	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
127	PENYULUH WISATA	1	0	1
128	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	5	12

129	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1	0	1
130	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1	0	1
131	PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	0	1
132	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	0	1
133	PETUGAS KEAMANAN	4	0	4
134	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	13	0	13
135	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	0	1	1
136	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA / TERAMPIL	2	1	3
137	PRAMU BAKTI	103	6	109
138	PRAMU KEBERSIHAN	42	2	44
139	PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	0	1	1
140	PRANATA KEARSIPAN	0	1	1
141	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	1
142	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
143	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
144	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	0	1
145	PRANATA TATA PRAJA	1	1	2
146	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	2	0	2
147	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	6
148	TENAGA GURU	1	10	11
149	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
150		824	395	1219
	Jumlah	834	396	1230

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum (Pelaksana) terbanyak dari jabatan Pengadministrasi Umum (390 PNS) dari 1.230 PNS fungsional umum.

TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	1	5	1	6	1	2	9	1	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	7	1	0	1	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	1	0	2	2	3	12	19	9	9	9	1	1	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7	7	3	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	0	0	1	7	3	10	5	7	3	2	7	7	1	1	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	18	3	3	7	0	5	1	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	0	6	49	24	211	117	153	160	15	29	20	0	0	785
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	6	2	1	1	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	2	1	2	4	4	1	9	2	1	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	15	3	3	5	8	0	4	1	7	4	0	1	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	0	0	1	0	0	2	2	7	17	7	20	6	7	2	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	2	0	0	4	5	5	1	2	8	3	1	1	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	15	7	10	28	14	17	13	5	8	5	0	1	0	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	3	6	2	1	1	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	1	0	0	1	2	3	4	2	5	7	0	1	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	5	2	4	0	1	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	4	3	11	25	72	79	456	421	388	469	589	253	11	0	0	2781
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	3	0	1	9	7	12	5	0	4	3	0	1	0	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	0	1	10	2	9	7	13	12	4	5	6	3	0	0	0	0	72
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	1	2	0	9	8	4	6	1	1	1	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	1	7	5	6	3	1	9	2	1	1	0	0	36
22	DINAS SOSIAL	0	0	0	1	0	0	3	3	3	1	2	4	2	1	0	0	0	20

23	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	1	0	7	2	6	12	7	3	3	0	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	0	0	0	1	3	2	5	3	3	1	1	0	0	0	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	0	0	0	0	4	3	7	9	28	8	9	3	0	0	0	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	1	1	2	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	3	2	0	1	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	1	0	0	0	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	1	0	0	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	1	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	0	0	0	2	5	2	3	2	2	1	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	1	0	1	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	3	1	1	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	0	1	1	0	0	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	3	0	1	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	0	0	1	3	3	4	4	3	3	1	1	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	0	1	1	0	4	23	9	23	59	44	95	38	25	5	0	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	0	0	0	0	32	1	14	18	14	12	4	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	2	1	1	9	11	3	4	5	3	4	1	0	0	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	1	0	2	7	7	26	17	7	12	6	7	8	0	0	100
44	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	1	0	1	1	4	5	4	5	3	3	1	1	0	0	29
	Jumlah	0	0	6	61	34	81	321	251	902	812	716	949	751	348	64	0	0	5296

TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	< 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	> 61	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	7	4	10	6	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2	2	6	8	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	3	14	31	20	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	4	5	12	3	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	11	11	18	14	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	9	12	6	11	0	38
7	DINAS KESEHATAN	0	25	285	303	172	0	785
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	4	4	5	5	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	4	2	10	10	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	1	3	25	22	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	5	20	25	21	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	4	3	9	16	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	9	16	41	57	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	2	1	11	6	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2	3	9	12	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	2	9	9	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	116	617	767	1281	0	2781
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	9	4	16	16	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	5	4	21	42	0	72
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	2	6	14	11	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	6	5	18	7	0	36
22	DINAS SOSIAL	0	2	5	6	7	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	3	8	17	14	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	4	3	12	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	1	5	6	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	2	11	32	26	0	71

27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	4	9	0	13
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	3	8	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	2	4	6	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	1	2	8	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	5	5	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	4	5	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	5	12	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	2	2	8	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	4	8	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	1	11	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	3	1	8	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	4	3	6	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	2	3	10	9	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	17	79	182	49	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	30	30	30	6	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	4	9	14	17	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	13	20	35	32	0	100
	SEKRETARIAT DPRD	0	2	5	12	10	0	29
	Jumlah	0	305	1210	1750	2031	0	5296

TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	3	0	0	5	1	14	4	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	2	0	0	1	0	11	3	1	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1	2	12	0	0	5	3	34	11	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	1	0	0	1	0	17	4	1	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	4	15	0	0	10	3	14	8	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	7	0	0	19	0	11	1	0	38
7	DINAS KESEHATAN	1	5	54	3	0	499	50	157	16	0	785
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	1	0	0	1	1	11	4	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	2	4	0	0	2	0	13	5	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	12	10	0	0	2	0	13	2	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1	0	2	0	0	5	4	55	4	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	2	7	0	0	2	1	14	5	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13	16	49	0	0	10	4	27	4	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	0	0	5	0	7	5	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	4	0	0	0	0	15	6	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	4	0	0	1	1	9	5	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	35	190	0	63	25	6	2295	160	1	2781
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	0	19	0	2	11	0	6	4	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6	15	29	0	0	4	0	16	2	0	72
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	9	0	1	8	1	11	3	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	9	0	0	5	0	17	4	0	36
22	DINAS SOSIAL	1	1	3	1	0	2	1	7	4	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	1	0	0	1	0	31	7	1	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	1	12	0	0	1	0	3	2	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	4	0	0	0	1	6	1	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	2	24	0	0	4	3	36	2	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	8	0	0	0	0	3	2	0	13

28	KECAMATAN BLADO	1	2	1	0	0	0	0	6	1	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	6	0	0	0	0	4	2	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	4	0	0	0	1	5	1	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	1	2	0	0	1	0	4	2	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	3	0	0	0	0	4	2	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	9	0	0	0	0	6	2	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	1	3	0	0	0	0	8	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	6	0	0	1	0	4	1	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	3	0	0	0	0	7	2	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	3	0	0	0	0	7	2	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	1	3	0	0	1	0	6	2	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	6	0	0	2	1	11	3	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	2	4	31	1	0	162	6	103	18	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	3	0	0	57	5	22	9	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	0	16	0	1	5	0	16	4	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	1	0	21	0	0	6	6	44	22	0	100
44	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	0	0	2	1	13	4	0	29
	Jumlah	**53**	**110**	**613**	**5**	**67**	**866**	**100**	**3123**	**355**	**4**	**5296**

GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK

a. Berdasarkan Usia

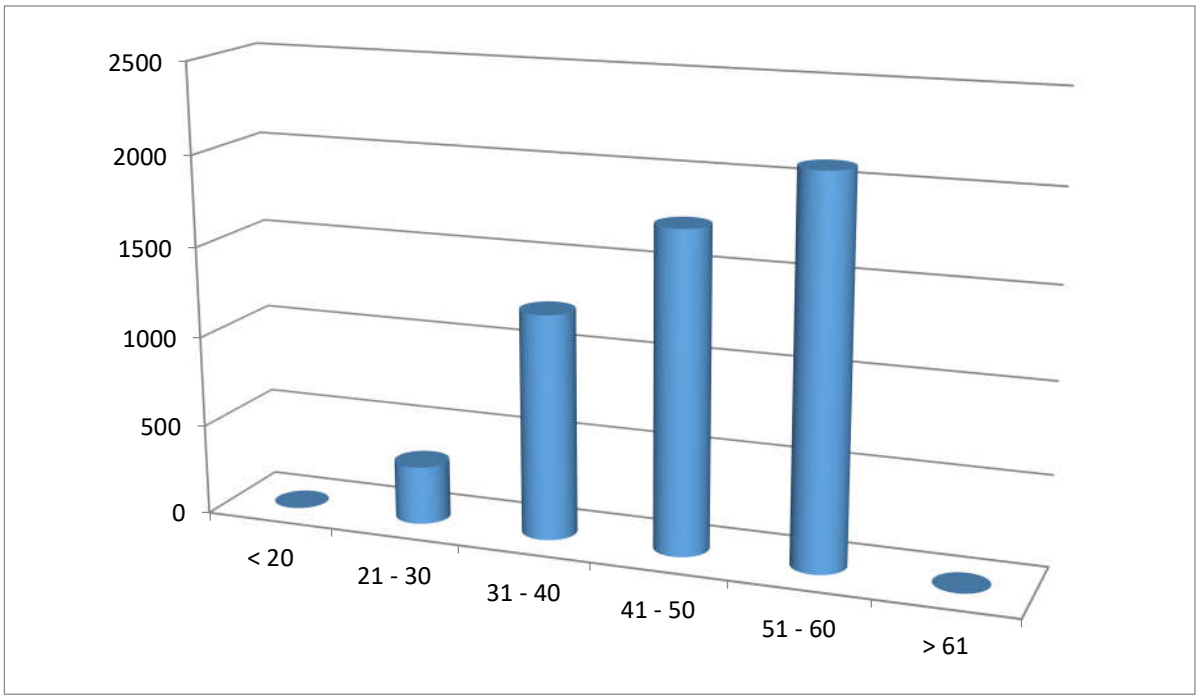

b. Berdasarkan Jenis Jabatan

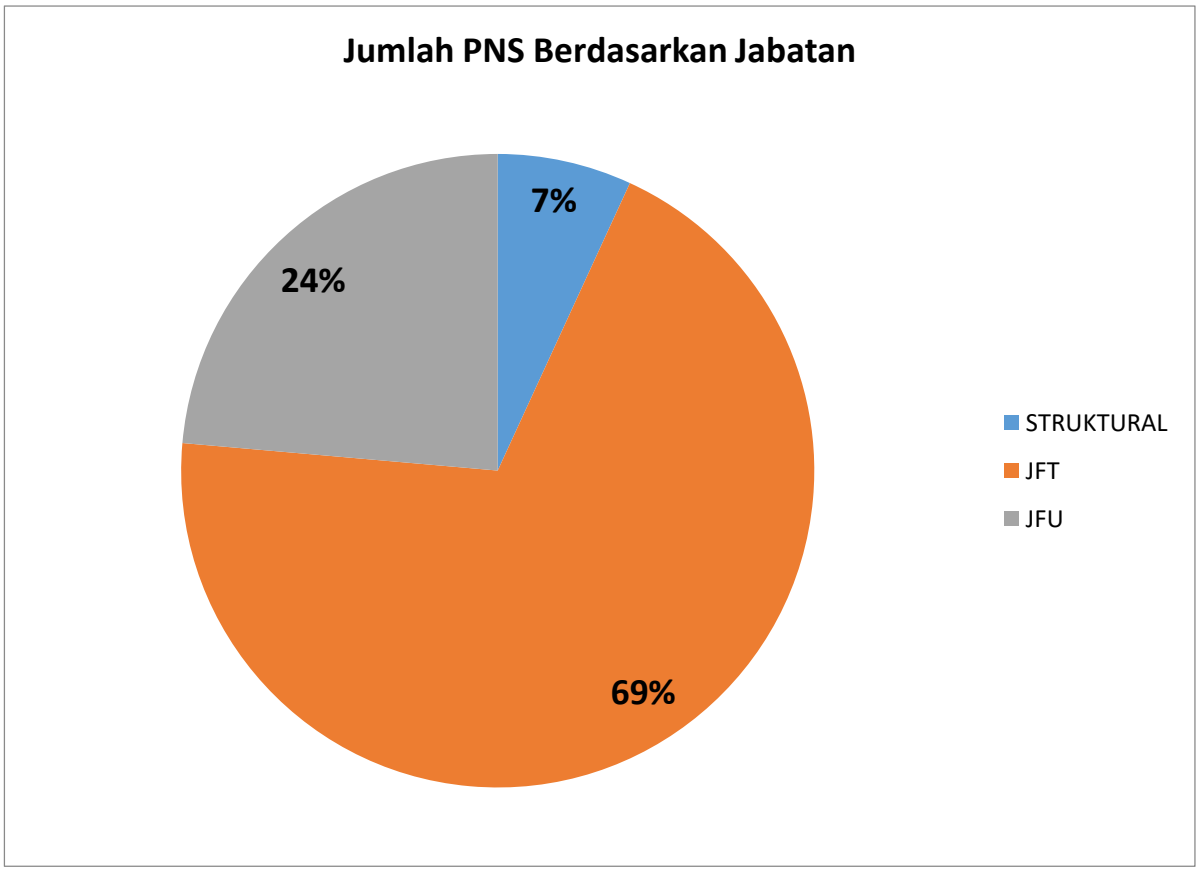

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

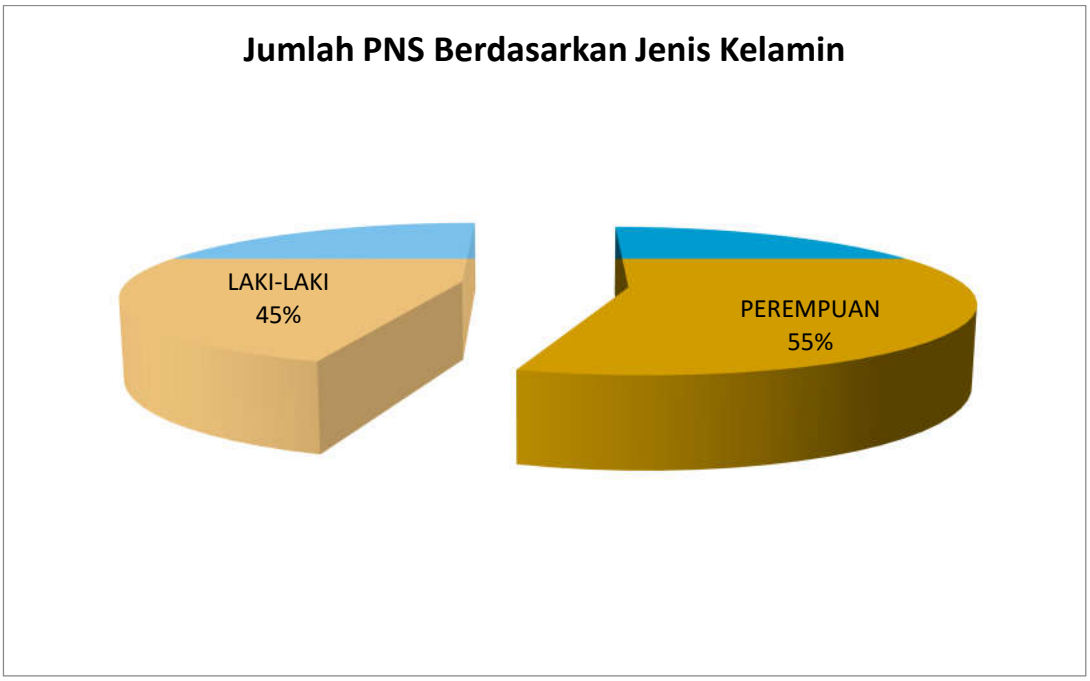
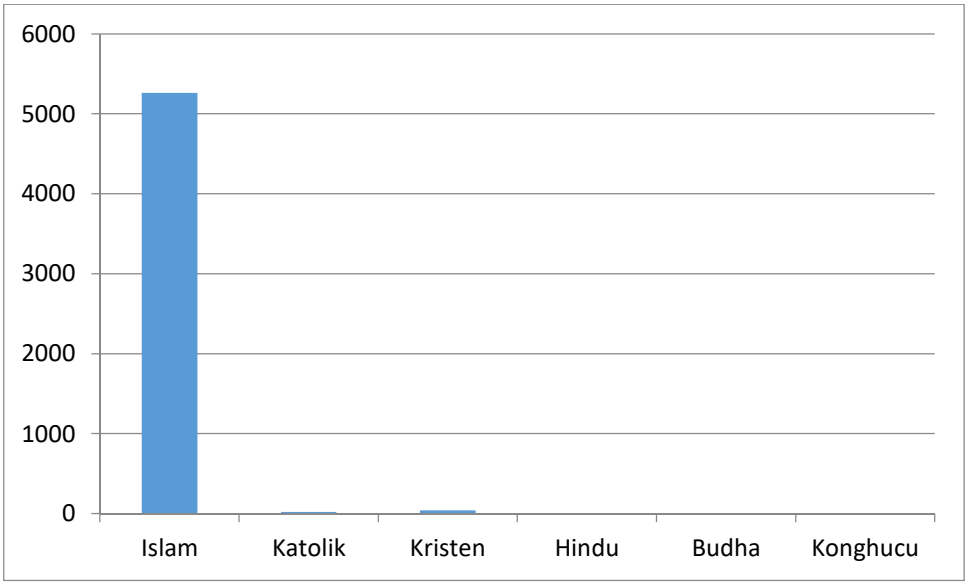
d. Berdasarkan Agama